

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL IV
TANJUNGPURBAN**

SKRIPSI



**Nama : Renndy Meidiansyah
NIM : 222013149.M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL IV
TANJUNGPURBAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Renndy Meidiansyah
NIM : 222013149.M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renndy Meidiansyah
Nim : 222013149.M
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2017

Penulis,



Renndy Meidiansyah
NIM. 222013149.M

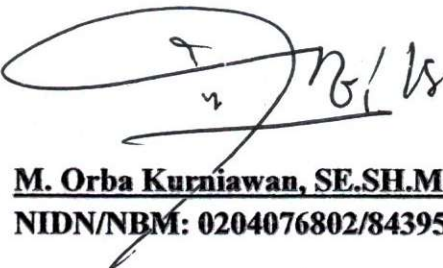
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV TanjungKarang
Nama : Renndy Meidiansyah
NIM : 222013149.M
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 17 Maret 2017

Pembimbing,



M. Orba Kurniawan, SE.SH.M.Si.
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin SE., AK., M.si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barangsiapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, RasulNya dan kaum muslimin.”

(Hadis Riwayat Al-Hakim)

Persiapkan diri agar pantas.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua ku tercinta,
Ayah Asprianto,
Ibu Ismianah S.Pd.I,
- ❖ Saudara ku tersayang,
Reza Sepriansyah
M. Raihan Sepriansyah
- ❖ Pembimbingku
M. Orba Kurniawan, SE., SH., M.Si.
- ❖ Sahabat dan rekan seperjuangan
- ❖ Almamaterku

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan KaruniaNya jualah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV TanjungKarang"**. Skripsi ini peneliti ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini, peneliti menghaturkan sembah-sujud kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai, mendidik, mendoakan, memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti. Begitu pula kepada saudara dan saudari ku yang telah banyak memberikan dorongan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Selain itu pada kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, antara lain:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan,S.E., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Orba Kurniawan, SE., SH., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Betri Sirajuddin SE., AK., M.si., Ak., CA dan Bapak Mizan SE., Ak., Msi selaku Ketua Program dan Sekretaris Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudha Mahrom DS SE., M.si dan Bapak M. Fahmi SE., M.si selaku Koordinator dan Sekretaris Kelas Reguler B dan C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha serta Sub Bagian Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Dia yang menyemangati, mendukung, serta memberikan waktunya menemani dalam pengerjaan skripsi ini Desi Ratnasari A.Md.Kep.
8. Teman-teman sekaligus sahabat karibku (M. Aprizal, Dede Pranaya, M. Rizki Febrian, Pebriansah, Rizki Santoso, Ariman Agustina Rahayu, Julian Ashariandi, Novita Utari, Zulmie Hanafia Basri OS, M. Ridho Anugerah).
9. Seluruh jajaran dan pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang yang telah bersedia membantu dan memberikan data terkait penelitian yang dilakukan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya, Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

Palembang, 15 Maret 2017
Peneliti,



Renndy Meidiansyah
NIM. 222013149.M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	12
1. <i>Good Corporate Governance</i>	12
a. Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	12
b. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	15

c. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	18
d. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	19
2. Kinerja	20
a. Definisi Kinerja.....	20
b. Pengukuran Kinerja.....	21
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	23
d. Skala Ukur Penilaian Kinerja Manajemen Berdasarkan Pencapaian Prinsip-prinsip GCG	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Operasionalisasi Variabel	27
D. Populasi dan Sampel	28
E. Data yang Diperlukan	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	36
2. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan.....	38
3. Budaya Kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	39
4. Struktur Organisasi Perusahaan.....	40
5. Aktivitas Perusahaan	42
6. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan.....	43
7. Gambaran Responden.....	44

a. Karakteristik Responden.....	44
b. Pengolahan Data.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	86
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Laporan Laba Rugi	5
Tabel II.1. Persamaan dan Perbedaan	12
Tabel III.1. Operasionalisasi Variabel	27
Tabel IV.1. Budaya Kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	39
Tabel IV.2. Karakteristik Responden	44
Tabel IV.3. Prinsip Transparansi (<i>Transparency</i>)	46
Tabel IV.4. Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	51
Tabel IV.5. Prinsip Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	58
Tabel IV.6. Prinsip Kemandirian (<i>Independent</i>)	61
Tabel IV.7. Prinsip Kewajaran (<i>Fairness</i>).....	65
Tabel IV.8. Hasil Pengujian Validitas Prinsip Transparansi	71
Tabel IV.9. Hasil Pengujian Validitas Prinsip Akuntabilitas	72
Tabel IV.10. Hasil Pengujian Validitas Prinsip Pertanggungjawaban.....	73
Tabel IV.11. Hasil Pengujian Validitas Prinsip Kemandirian	74
Tabel IV.12. Hasil Pengujian Validitas Prinsip Kewajaran.....	74
Tabel IV.13. Hasil Pengujian Reabilitas Prinsip Transparansi.....	76
Tabel IV.14. Hasil Pengujian Reabilitas Prinsip Akuntabilitas	77
Tabel IV.15. Hasil Pengujian Reabilitas Prinsip Pertanggungjawaban	78
Tabel IV.16. Hasil Pengujian Reabilitas Prinsip Kemandirian.....	79
Tabel IV.17. Hasil Pengujian Reabilitas Prinsip Kewajaran	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran.1. Instrumen Penelitian
- Lampiran.2. Laporan Laba (rugi)
- Lampiran.3. Distribusi Jawaban Instrumen Penelitian
- Lampiran.4. Lampiran Uji Instrumen
- Lampiran.5. Lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran.6. Surat Keterangan Riset
- Lampiran.7. Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian dan Skripsi
- Lampiran.8. Sertifikat AIK
- Lampiran.9. Sertifikat TOEFL
- Lampiran.10. Piagam KKN
- Lampiran.11. Biodata Penulis

ABSTRAK

Renndy Meidiansyah/ 22 2013 149M/ 2017 “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang**”/ Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* dalam menilai kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dalam menilai kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 96 orang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan teknik analisis pada penelitian ini analisis kualitatif untuk menjelaskan tentang fenomena masalah yang ada pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang kemudian dihubungkan dengan beberapa teori.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (simpulan) prinsip-prinsip *good corporate governance* sudah terlaksana dengan cukup baik pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan prinsip *good corporate governance* itu sendiri, meliputi Prinsip:

1. *Transparansi (Transparency)*,
2. *Kemandirian (Independency)*,
3. *Akuntabilitas (Accountability)*,
4. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*
5. *Kewajaran (Fairness)*.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Kinerja

ABSTRACT

Renndy Meidiansyah/ 22 2013 149.M/ 2017 “The Analysis of Good Corporate Governance Implementation In Evaluate The Performance At PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang”/Accountancy of Sector Public.

This research is aimed at finding out the implementation of good corporate governance in assessing the performance at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang based on the principles of good corporate governance.

The type of this research was a descriptive research in line with the implementation of good corporate governance to assess the performance at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang. The sample of the research were ninety six from the concerned company. The data of this research were primary data and secondary data. The techniques of collecting was through questionnaires and report. This research was a qualitative analysis. The technique of analyzing the data was through delineating the performance's problem at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang.

The result of the study showed that the principles of good corporate governance had been applied well at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division IV Tanjungkarang. It could be seen on the implementation of the principles of good corporate governance. In practice, the principles of:

- 1. Transparency,*
- 2. Independency,*
- 3. Accountability,*
- 4. Responsibility,*
- 5. Fairness*

Key Words :Good Corporate Governance, Business

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan suatu perusahaan dalam era modern yang semakin berkembang dengan sistem ekonomi yang bebas serta terbuka menjadi semakin kompleks. Bertambah pesatnya dan kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan semakin memerlukan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Indikator dari pengelolaan perusahaan yang baik dapat tercermin dari kinerja perusahaan yang positif yang tidak hanya memberikan laba bagi para pemilik saham tetapi juga menjamin kelangsungan hidup perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas.

Sesuai pasal 1 ayat 1, peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01 /MBU/2011, *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangan dan etika berusaha. Meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Penerapan dan pengelolaan *Corporate Governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance (GCG)* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

Simanjuntak (2011: 1) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, suatu organisasi harus disusun dalam unit-unit kinerja yang lebih kecil, dengan melakukan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas.

Kinerja Perusahaan merupakan hasil dari suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya. Salah satu parameter untuk mengukur kinerja tersebut adalah laba. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional yang berasal dari berbagai macam sumber

dayanya. Dengan adanya laba, dapat memberikan sinyal mengenai prospek perusahaan di masa depan mengenai kinerja perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan memberikan sinyal yang positif mengenai kinerja perusahaan. Karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu, tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat diwujudkan berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang tercermin pada anggaran. Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahaan. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, perusahaan akan mengamati seberapa jauh suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Toni (2010) membuktikan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan pada PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Cahyani Nuswandari (2009) Pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja pasar cenderung baru dapat dilihat dalam jangka panjang karena terkait dengan tingkat kepercayaan dari investor.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa layanan angkutan penumpang dan barang di Indonesia. Memiliki Visi yaitu menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*. Memiliki Misi yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model usaha organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan. Dan memiliki Tujuan yaitu melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi dengan menyediakan barang-jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional dibidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan dan pengusahaan bisnis properti secara profesional, serta pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta api secara aktif untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 2015 PT. Kereta Api Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan terpercaya (*Trusted Company*) berdasarkan *Corporate Governance Perception Index*. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa PT. Kereta Api Indonesia telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* dengan sangat baik.

Divisi Regional IV Tanjungkarang salah satu dari empat divisi yang ada di Pulau Sumatera milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Divisi Regional

IV Tanjungkarang dahulunya merupakan subdivisi dari Divisi Regional III Sumatera Selatan. Wilayahnya mencakup dari Stasiun Tarahan (Lampung) sampai ke Stasiun Tanjung Rambang (Sumatera Selatan).

Tabel I.1
Laporan Laba Rugi
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang
(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Akun	Tahun 2014	Tahun 2015
Pendapatan :		
a. Pendapatan Operasional	1.796.091	2.200.075
b. Pendapatan Non Operasional	116.397	78.988
Total Pendapatan	1.912.488	2.279.063
Beban :		
a. Beban Pokok Penjualan	355.173	678.082
b. Beban Usaha	15.022	14.470
Total Beban	370.195	692.552
Laba	1.542.293	1.586.511

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, 2017.

Pada laporan laba rugi menunjukkan transparansi yang baik dimana akun-akun pendapatan dan beban telah dijelaskan secara transparan. Data juga tersaji dengan jelas. Pada akuntabilitas terlihat memang pada tahun 2014-2015 sektor pendapatan mengalami kenaikan, akan tetapi pada sektor beban pun mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga mempengaruhi tingkat laba perusahaan.

Banyak hal yang mempengaruhi kinerja karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Divisi Regional IV Tanjungkarang ini, diantaranya: lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti masih banyak stasiun yang posisinya berada di tengah hutan dan beberapa stasiun berada di lingkungan

latihan tempur TNI AD, kurangnya implementasi asas *the right man in the right place* dan *the right man in the right job*, keteladanan pemimpin dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kerja sesuai standar operasional kerja yang diberlakukan perusahaan, penyampaian informasi masih kurang akurat dan terbuka untuk manajemen bawah. Perubahan struktur organisasi dan peraturan yang kurang sosialisasi kepada para karyawan, keterlambatan kereta api baik disebabkan sarana, prasarana dan alam maupun faktor eksternal karena persaingan dengan moda transportasi lain.

Dengan demikian, melihat uraian-uraian diatas maka menarik dilakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai

Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

2. Bagi PT. Kereta Api Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. Kereta Api Indonesia mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Maulia (2014) yang berjudul Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan (studi kasus pada PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.). Rumusan masalah yaitu pengkajian lebih lanjut mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas sehari – hari ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas sehari – hari ASTRA sebagai salah satu perusahaan di Indonesia. Jenis Penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan angket kuesioner. Teknik analisis adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Hasil penelitian Keadaan perkembangan bisnis yang semakin kompleks mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk menyusun Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang juga menjadi acuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kesetaraan.

Penelitian yang dilakukan Toni (2010) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Internal Audit Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Pendekatan *Balanced Scorecard* (survey PT. Kereta Api Indonesia). Rumusan masalah Bagaimana *Good Corporate Governance*, Audit Internal dan Kinerja Perusahaan di PT. Kereta Api Indonesia?. Tujuan dari Penelitian untuk mengetahui *Good Corporate Governance*, Audit Internal dan Kinerja Perusahaan di PT. Kereta Api Indonesia. Jenis penelitian adalah komparatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah metode kuesioner. Teknik analisis adalah kuantitatif.

Hasil penelitian Secara keseluruhan *Good Corporate Governance* sudah dinilai sangat baik atau tergolong sangat baik (89,1%) begitu pun dengan internal audit (88,5%) dan kinerja perusahaan (87,3%) di PT Kereta Api Indonesia. Terdapat hubungan yang signifikan antara *Good Corporate Governance* dengan internal audit di PT. Kereta Api Indonesia, nilai sig (0,00) < 0,005 dimana semakin baik *Good Corporate Governance*, maka akan diikuti oleh semakin baik internal audit.

Secara parsial *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan pada PT Kereta Api Indonesia dengan total pengaruh sebesar 31,8%, terdiri dari pengaruh langsung ke kinerja perusahaan sebesar 16,77% dan pengaruh tidak langsung melalui internal audit sebesar 14,99%. Secara parsial internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan pada PT Kereta Api Indonesia dengan

total pengaruh sebesar 41,0%, terdiri dari pengaruh langsung ke kinerja perusahaan sebesar 26,0% dan pengaruh tidak langsung melalui *Good Corporate Governance* sebesar 14,99%. Secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari *Good Corporate Governance* dan internal audit terhadap kinerja perusahaan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 72,7% sisanya sebesar 27,3% merupakan kontribusi atau pengaruh dari variabel lain diluar penelitian.

Penelitian yang dilakukan Cahyani Nuswandari (2009) yang berjudul *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*. Rumusan masalah bagaimanakah pengaruh *corporate governance perception index* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta?. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh *corporate governance perception index* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. Jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dengan mengunduh dokumen dari *website* perusahaan yang terdaftar di bursa efek jakarta. Teknik analisis adalah kuantitatif.

Hasil penelitian Penelitian ini bertujuan menginvestigasi pengaruh *corporate governance* perusahaan dengan kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 101 sampel yang merupakan *pooled data* dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Hasil pengujian untuk model regresi dengan *return on equity* sebagai variabel dependennya menunjukkan

variabel *CGPI* secara positif signifikan mempengaruhi kinerja operasi. Hanya satu variabel kontrol yang secara statistik signifikan mempengaruhi *ROE* yaitu variabel ukuran perusahaan sedangkan variabel komposisi aktiva dan variabel kesempatan pertumbuhan tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap kinerja operasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang pertama didukung yaitu bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan.

Hasil analisis regresi model Tobin's Q menunjukkan variabel *CGPI* secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar (Tobin's Q). Tidak satu pun variabel kontrol yang secara statistik mempengaruhi kinerja pasar. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja pasar secara statistik tidak didukung. Hasil penelitian mendukung penelitian Darmawati, dkk., (2005). Hal ini mungkin dikarenakan respon pasar terhadap implementasi *corporate governance* tidak secara langsung akan tetapi membutuhkan waktu. Pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja pasar cenderung baru dapat dilihat dalam jangka panjang karena terkait dengan tingkat kepercayaan dari investor

Perbandingan diantara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini adalah terletak pada persamaan dan perbedaan yaitu :

Tabel II.1
Pesamaan dan Perbedaan

No	Nama Penulis, Tahun Peneliti, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maulia (2014) yang berjudul Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada perusahaan (Studi kasus pada PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang <i>Good Corporate Governance</i>	PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk sedangkan dalam penelitian pada ini pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang
2	Toni (2010) yang berjudul Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Internal Audit Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Pendekatan <i>Balanced Scorecard</i> (survey PT. Kereta Api (persero))	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang <i>Good Corporate Governance</i>	Peneliti sebelumnya memasukan internal audit sedangkan penelitian ini tidak memasukan internal audit
3	Cahyani Nuswandari (2009) yang berjudul Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang <i>Good Corporate Governance</i>	Peneliti sebelumnya meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sedangkan dalam penelitian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang

Sumber : Penulis, 2017

B. Landasan Teori

1. Good Corporate Governance

a. Definisi Good Corporate Governance

Pengertian *Corporate Governance* menurut *Turnbull Report* dalam Effendi (2016: 2-3), sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset

perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Bank Dunia (World Bank) Mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Lembaga *corporate governanace* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), Mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI), *Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, di mana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.

Sesuai pasal 1 ayat 1, peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota the *stakeholders* non-pemegang saham.

Gambaran diatas, dapat didefinisikan *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *Good Corporate Governance* adalah mencari cara untuk memaksimumkan

penciptaan kesejateraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan. Menurut SK Menteri BUMN Nomor : PER – 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* BAB II pasal tiga prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip– prinsip korporasi yang sehat.
- 4) Kemandirian (*indepedency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Effendi (2016, 11-15), Prinsip-prinsip *corporate governance* dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan/kewajaran). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *corporate governance* tersebut.

1) Prinsip Transparansi

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelola perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- (a) Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang, keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara, anggota dewan komisaris serta penghasilannya, faktor-faktor resiko yang akan datang, isu-isu yang berhubungan dengan para

karyawan dan pihak berkepentingan lainnya, struktur dan kebijakan *governance* perusahaan.

- (b) Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan, dan non-keuangan, serta audit.
- (c) Pemeriksaan tahunan harus dilakukan oleh auditor independen.
- (d) Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut :

- (a) Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan.
- (b) Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

(c) Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis.

3) Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundangan-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggungjawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik.

4) Prinsip Independensi

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

5) Prinsip Kesetaraan/kewajaran

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas.

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Hery (2010: 73) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- 1) *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang ada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

- 2) *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
- 4) Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- 5) Mengurangi korupsi.

d. Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan. Menurut SK Menteri BUMN Nomor : PER – 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* BAB II pasal empat tujuan *Good Corporate Governance* meliputi :

- 1) Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
- 2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.

- 3) Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- 5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2. Kinerja

a. Definisi Kinerja

Pengertian Kinerja menurut Simanjuntak (2011: 1), adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, suatu organisasi harus disusun dalam unit-unit kinerja yang lebih kecil, dengan melakukan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas.

Mulyadi (2013: 337), kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategik perlu diukur. Itulah sebabnya sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan

ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Dari definisi diatas maka kinerja adalah suatu hasil kerja secara kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik sesuai tugas dan kewajiban yang diberikan dan didasari atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan atau apakah kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci sukses organisasi.

Kinerja merupakan proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam memberikan jasa atau produk kepada pelanggan. Kinerja sebagai rekaman hasil kerja yang diperoleh dari karyawan tertentu melalui kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Mardiasmo (2009: 123-124) menerangkan bahwa informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan ada dua yaitu :

1) Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

2) Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan tolak ukur kinerja perusahaan. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengumpulan komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi adalah *balanced scorecard*. Dengan *balance scorecard* kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *balanced scorecard* melibatkan empat aspek yaitu :

- a) Perspektif keuangan adalah pengukuran kinerja keuangan mengindikasikan apakah strategi perusahaan, penerapannya, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi pada peningkatan yang mendasar,
- b) Perspektif kepuasan pelanggan adalah kemampuan perusahaan mengidentifikasi pelanggan atau segmen pasarnya,

- c) Perspektif efisiensi proses internal adalah proses yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa sehingga dapat menarik dan mempertahankan pelanggan pasar yang akhirnya dapat memuaskan ekspektasi pemegang saham,
- d) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah mengidentifikasi instruktur yang harus dibangun perusahaan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam jangka panjang.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009: 122), manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya pengukuran kinerja antara lain :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Mulyadi (2007: 360) menjelaskan bahwa manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimal.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel, seperti : promosi, transfer dan pemberhentian.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel.
- 4) Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

d. Skala Ukur Penilaian Kinerja Manajemen Berdasarkan Pencapaian Prinsip-prinsip GCG :

Siskie (2009: 28) Skala ukur penilaian kinerja manajemen berdasarkan pencapaian prinsip-prinsip *GCG*, antara lain :

- 1) Baik, berarti praktek yang ada sudah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- 2) Perlu peningkatan, berarti praktek yang ada baru memenuhi prinsip minimal yang dikehendaki.
- 3) Perlu perbaikan, berarti praktek yang ada belum memenuhi mencerminkan prinsip-prinsip *GCG* secara umum perbaikan yang signifikan.
- 4) Buruk, berarti belum ada praktek yang sesuai dengan prinsip-prinsip *GCG* atau praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *GCG*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2016: 53-55), jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya dibagi tiga macam, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam peneliti adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dalam menilai kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang yang berlokasi di Jl. Teuku Umar No. 23 Kelurahan Pasir Gantung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel tersebut diukur. Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<i>Good Corporate Governance</i>	Prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi (<i>transparency</i>) 2. Akuntabilitas (<i>accountability</i>) 3. Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>) 4. Kemandirian (<i>indepency</i>) 5. Kewajaran (<i>fairness</i>)
Kinerja	Tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, suatu organisasi harus disusun dalam unit-unit kinerja yang lebih kecil, dengan melakukan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finansial (Laporan laba rugi)

Sumber: Penulis, 2017

D. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2016: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang yang berjumlah 2285 orang.

Sugiyono (2016: 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus slovin dalam Umar (2011: 78), sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil nilai $e = 10\%$

Maka :

$$n = \frac{2285}{1 + 2285 0,1^2}$$

$$n = \frac{2285}{23.85}$$

$$n = 96$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 96 sampel.

Sugiyono (2016: 116-123) metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pemilihan sampel pengambilan (*Probability Sampling*)
 - a. *Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel yang ada dalam populasi itu
 - b. *Proportionate stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
 - c. *Disproportionate stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.
 - d. *Cluster sampling* adalah teknik sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data yang luas.
2. Metode pemilihan sampel nonprobabilitas (*Non Probability*)
 - a. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut.
 - b. *Purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
 - c. *Sampling kuota* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri – ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan

- d. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.
- e. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.
- f. Sampling jenuh adalah teknik pertemuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sampel.

Sampel penelitian ini menggunakan *accidental sampling* dimana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel

E. Data yang diperlukan

Umar (2011: 41-42), data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya.

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini berupa pengisian angket kepada karyawan. Data sekunder berupa laporan

keuangan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugioyono (2016: 401-425), dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner dan dokumentasi. Penulis membagikan angket pertanyaan ke pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung

Karang. Dokumentasi dengan Laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiono (2016: 13-14), analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

Analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner tentang fenomena masalah yang ada pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang kemudian dihubungkan dengan beberapa teori.

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan Skala Guttman, yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA: kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

Skor Nilai :

Ya : (1)

Tidak: (0)

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Sumber: Riduan, 2013

Keterangan :

\sum Jawaban “YA” : Seluruh Penjumlahan jawaban YA yang dijawab oleh responden dalam kuesioner

Jumlah Pertanyaan : Pertanyaan yang ada dalam Kuesioner berdasarkan klasifikasinya masing-masing

2. Teknik Analisis

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Uji Validitas Data

Uji validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha*. Sugiyono (2012: 172-174), pada metode *Cronbach's Alpha* nilai R-hitung diwakili oleh nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Kriteria uji validitas data adalah sebagai berikut:

- (a) Jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r_{hitung}) $\geq r_{tabel}$, maka instrumen dikatakan valid, dan
- (b) Jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* (r_{hitung}) $< r_{tabel}$, maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas Data

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi. Pengujian terhadap konsistensi internal yang dimiliki oleh suatu instrumen merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk menguji reliabilitas, disamping pengukuran koefisien stabilitas dan ekuivalensi. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsisten antara butir-butir pertanyaan dalam satu instrumen.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini, menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Sugiyono (2012: 172-174) *Cronbach's Alpha* sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-20, 0-50). Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, Sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Pengukuran terhadap variabel yang digunakan, dilaksanakan dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya dalam perusahaan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Data hasil penelitian

yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis oleh penulis untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alat pertanggungjawaban pada PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, dikumpulkan melalui penelitian atas hasil kuesioner dengan menggunakan perhitungan presentase.

Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase menggunakan ketentuan Riduan (2013: 15) menggunakan Skala Guttman sebagai berikut:

- (a) 0% - 20% = Sangat Lemah
- (b) 21% - 40% = Lemah
- (c) 41% - 60% = Cukup
- (d) 61% - 80% = Kuat
- (e) 81% - 100% = Sangat Kuat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia telah dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan pembangunan jalan kereta api yang pertama di Semarang Kedu dan seterusnya pada tahun 1842-1862 dengan surat keputusan Raja Belanda 28 mei 1842 nomor 270.

Di Sumatera sendiri berdiri pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan Zoice Sumatera Spoorwagen (ZSS). Awal mulanya pembuatan jaringan kereta api di Sumatera Selatan telah ada sejak tahun 1895.

Pada tahun 1908-1910 diputuskan untuk membuat rencana persiapan survey dan pengukuran jalur. Pada tahun 1912 dipimpin Ir. Van Der Woorden pemasangan rel terusan Teluk Betung-Tanjungkarang-Prabumulih dan Kertapati-Muaraenim-Tanjungenim serta dilanjutkan jalur Muaraenim-Lahat dan Tebingtinggi.

Pada bulan maret 1942, Jawa dan Sumatera dikuasai oleh Jepang dan kereta api dikuasai oleh tentara Jepang dan di Sumatera kereta api dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang (KAIGUN). Adapun sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 September 1945 setelah Indonesia merdeka, maka kereta api diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan nama DKKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia)
- b. Pada tahun 1963 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22/1963 tanggal 2 Mei 1963, maka status Djawatan kereta api menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api)
- c. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 19 tahun 1969 serta lembaran negara nomor 40 tahun 1969 (Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1971) mulai September 1971, maka status PNKA menjadi PERJAN (Perusahaan Djawatan Kereta Api)
- d. Pada tahun 1990 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1990 maka status Perusahaan Djawatan berubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api)
- e. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998 dan akta notaris Imas Fatimah nomor 2 tahun 1999 tanggal 1 Juni 1999, maka status PERUMKA diubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- f. Perkeretaapian di Sumatera Selatan sendiri sejak tanggal 18 September 1945 setelah diambil alih dari Jepang hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin.

Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang terletak di jalan Jl. Teuku Umar No. 23 Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung. Wilayah

operasionalnya mulai dari Stasiun Tarahan di Lampung sampai Stasiun Tanjung Rambang di Sumatera Selatan.

2. Visi Misi dan Tujuan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

a. Visi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Visi PT Kereta Api yaitu menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *Stakeholders*.

b. Misi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Misi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model usaha organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan.

c. Tujuan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Tujuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi dengan menyediakan barang-jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan dan pengusahaan bisnis property secara profesional, serta pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta api secara aktif untuk kemanfaatan umum.

3. Budaya Kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Budaya kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), terdiri dari:

Tabel IV.1

Budaya Kerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Budaya Kerja	Penjabaran
Integritas	Insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.
Profesional	Insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.
Keselamatan	Insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.
Inovasi	Insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi <i>stakeholder</i> .
Pelayanan Prima	Insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: <i>Ability</i> (Kemampuan), <i>Attitude</i> (Sikap), <i>Appearance</i> (Penampilan), <i>Attention</i> (Perhatian), <i>Action</i> (Tindakan), dan <i>Accountability</i> (Tanggung jawab).

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 2017

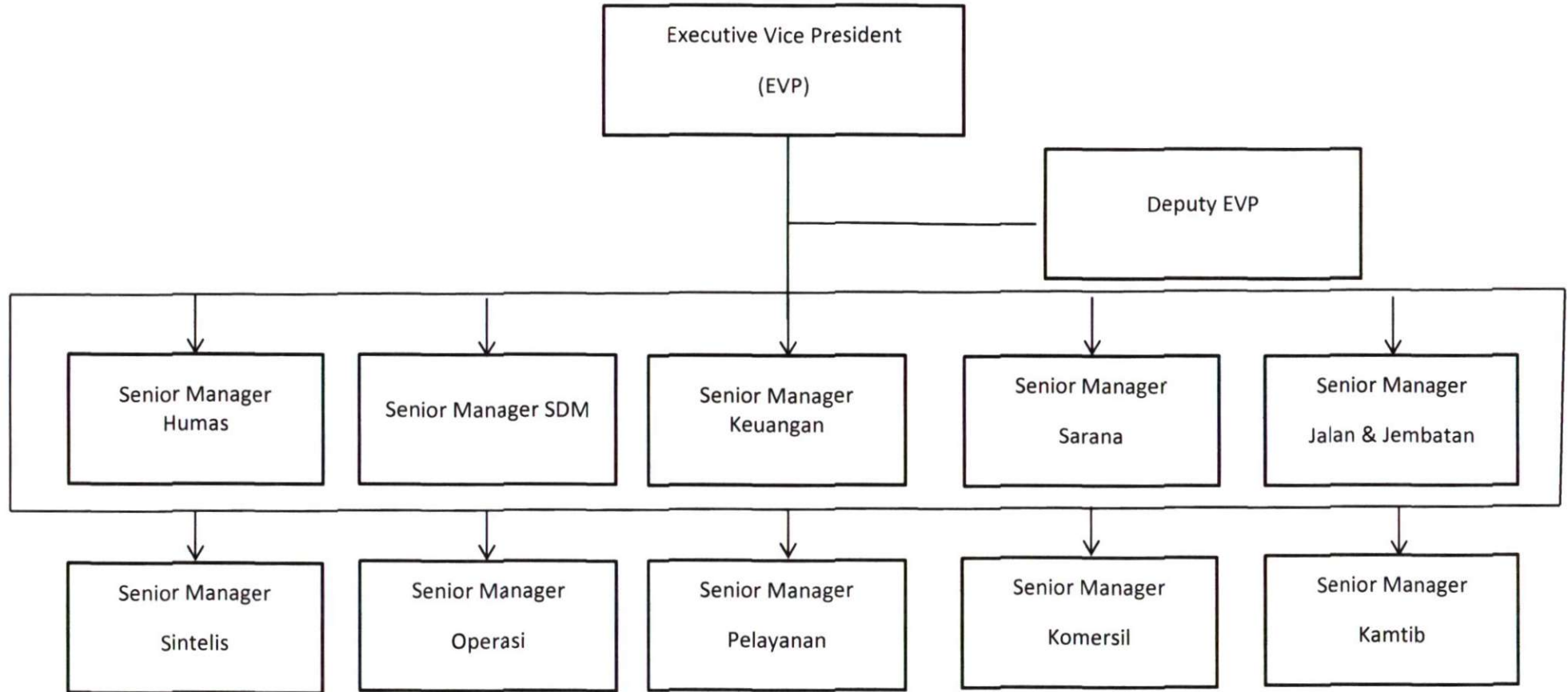
4. Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Operasi Divisi Regional IV Tanjungkarang

Dalam Struktur organisasi suatu perusahaan akan dapat dilihat proses kelompok kegiatan yang menetapkan fungsi-fungsi dan tanggungjawab masing-masing karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Struktur organisasi menggambarkan suatu hubungan kerja, besar kecilnya wewenang dan tanggungjawab karyawan. Dengan struktur organisasi ini tugas dan hubungan antar bagian dapat dilihat dengan jelas. Karena Struktur organisasi juga dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi.

Struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam gambar IV.2 berikut ini :

Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Divisi Regional IV Tanjungkarang



Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, 2017

5. Aktivitas Perusahaan

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang memegang peranan penting di bidang transportasi karena perkerataapian merupakan salah satu transportasi yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal. Perkerataapian menyediakan jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan barang. Berikut ini jenis angkutan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

a. Kereta Penumpang

- 1) Kereta Api Limeks Sriwijaya (Eksekutif dan Bisnis) yang melayani rute perjalanan Stasiun Kertapati – Stasiun Tanjungkarang PP
- 2) Kereta Api Rajabasa (Ekonomi) yang melayani rute perjalanan Stasiun Kertapati – Stasiun Tanjungkarang PP
- 3) Kereta Api Way Umpu (AC Ekonomi) yang melayani rute perjalanan Stasiun Tanjungkarang – Stasiun Kotabumi PP
- 4) Kereta Api Seminung (Ekonomi) yang melayani rute perjalanan Stasiun Tanjungkarang- Stasiun Kotabumi PP.

b. Kereta Barang

- 1) Kereta Api Batu Bara Rangkaian Panjang (KA BBR/Babaranjang) PT Bukit Asam (Stasiun Tanjungenim Baru – Stasiun Tarahan)
- 2) Kereta Api Batu Bara (KA PT SB) PT Semen Baturaja (Stasiun Tanjungenim Baru – Stasiun Tigagajah)
- 3) Kereta ApiMinyak Bumi (KA BBM) (Stasiun Kertapati –Stasiun Tigagajah)

- 4) Kereta Api Semen dalam bentuk klingker (Stasiun Tigagajah – Stasiun Kertapati)
- 5) Kereta Api pulp (KA PT TEL) PT Tanjungenim Lestari (Stasiun Niru – Stasiun Tarahan)

6. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpangan dan resiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Selain dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban *stakeholders*. Penerapan *Good Corporate Governance* juga mempercepat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam membentuk budaya perusahaan yaitu integritas, profesionalisme, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyusun *framework* dan *roadmap* dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*

secara berkesinambungan. Hal ini disusun dan dipahami oleh seluruh insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan diinternalisasikan keseluruhan lapisan perusahaan dengan tiga target *maturity* penerapan, yaitu *Good Corporate Governance, Good Governance Company, Good Sustainability Corporate*.

7. Gambaran Responden

a. Karakteristik Responden

Berikut ini akan dijabarkan karakteristik responden yang terdiri dari pendidikan terakhir, usia dan lama bekerja, sebagai berikut :

Tabel IV.2
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Frekuensi	Persen
1.	Tingkat Pendidikan		
	a. SMA	60	63%
	b. D-III	16	17%
	c. S1	20	20%
	Jumlah	96	100%
2.	Lama Bekerja		
	a. 1- 5 tahun	27	28%
	b. 6 – 10 tahun	37	39%
	c. 11 – 15 tahun	22	23%
	d. 15> tahun	10	10%
	Jumlah	96	100%
3.	Usia		
	a. 20 – 30 tahun	65	68%
	b. 31 – 40 tahun	17	18%
	c. 41 – 50 tahun	9	9%
	d. 51 – 60 tahun	5	5%
	Jumlah	96	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini didominasi pendidikan SMA.

Dari 96 responden, sebanyak 60 orang (63%) memiliki tingkat pendidikan SMA sedangkan sisanya sebanyak 16 orang (17%) memiliki tingkat pendidikan Diploma III dan 20 orang (20%) memiliki tingkat pendidikan Sarjana Strata 1. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang masih belum memadai karena masih didominasi tingkat pendidikan SMA.

Untuk lama bekerja responden kali sebanyak 27 orang (28%) sudah bekerja selama kurun waktu 1-5 tahun, sebanyak 37 orang (38%) sudah bekerja selama 6-10 tahun, sebanyak 22 orang (23%) sudah bekerja selama 11-15 tahun, sedangkan yang telah bekerja >15 tahun sebanyak 10 orang (10%). Hasil ini memberikan gambaran bahwa responden kali ini sudah cukup lama bekerja dan mengenal lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang karena sebanyak 72% responden sudah lebih dari 5 tahun bekerja.

Sedangkan untuk usia pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini berusia 20-30 tahun sebanyak 65 orang (68%), 31-40 tahun sebanyak 17 orang (18%), 41-50 tahun sebanyak 9 orang (9%) sedangkan sisanya 5 orang (5%) berusia 51-60 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa responden masih dalam usia yang produktif.

b. Pengolahan Data

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* perusahaan pada era globalisasi sangat pula bergantung kepada nilai-nilai budaya perusahaan yang dianut dan dipraktekkan di lingkungan perusahaan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* harus dijalankan secara dalam kebijakan- kebijakan perusahaan. Hal ini diperlukan untuk membentuk tingkah laku didalam perusahaan. Maka dari itu diperlukan penerapan budaya perusahaan yang mempunyai pengaruh dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

1) Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Tabel IV.3

Prinsip Transparansi (*Transparency*)

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip keterbukaan ?	76	80%	20	20%	96	100%
2	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu ?	96	100%	-	-	96	100%
3	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara memadai (memenuhi kebutuhan para <i>stakeholders</i>) ?	96	100%	-	-	96	100%
4	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara jelas ?	96	100%	-	-	96	100%

5	Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan ?	96	100%	-	-	96	100%
6	Apakah informasi perusahaan dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya ?	80	83%	16	17%	96	100%
	Visi	80	83%	16	17%	96	100%
	Misi	80	83%	16	17%	96	100%
	Sasaran usaha	76	80%	20	20%	96	100%
	Strategi perusahaan	62	65%	34	35%	96	100%
	Kondisi keuangan	76	80%	20	20%	96	100%
	Susunan dan kompensasi pengurus	64	66%	32	34%	96	100%
	Pemegang saham pengendali	56	58%	40	42%	96	100%
	Kepemilikan saham direksi dan anggota dewan komisaris	56	58%	40	42%	96	100%
	Sistem manajemen resiko	76	79%	20	21%	96	100%
	Sistem pengawasan dan pengendalian internal	80	83%	16	17%	96	100%
	Sistem pelaksanaan <i>good corporate governance</i> serta tingkat kepatuhannya	80	92%	16	17%	96	100%
	Kejadian penting yang dapat mempengaruhi perusahaan	80	83%	16	17%	96	100%
7	Apakah dengan adanya prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan, kerahasiaan perusahaan tidak akan menjadi berkurang ?	76	80%	20	20%	96	100%
8	Apakah kebijakan						

	perusahaan telah dijelaskan secara tertulis ?	96	100%	-	-	96	100%
9	Apakah kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan ?	96	100%	-	-	96	100%
Total		1674		342		2016	

Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner, 2017

Mengenai pelaksanaan prinsip transparansi (*transparency*), diperoleh bahwa pemahaman responden tentang pengertian transparansi (*transparency*) adalah sebanyak 76 orang (80%) yang mengerti tentang prinsip transparansi, sisanya sebanyak 20 orang (20%) yang tidak mengerti prinsip transparansi. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dapat memahami dan mengerti tentang pengertian transparansi (*transparency*).

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara tepat waktu adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan informasi tidak disediakan secara tepat waktu tidak ada. Ini berarti bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyediakan informasi secara tepat waktu.

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*) adalah sebanyak 96 orang (100%), sedangkan yang menyatakan informasi tidak disediakan secara memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*) tidak ada. Artinya jelas bahwa PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyediakan informasi secara memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*)

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara jelas adalah 96 orang (100%), yang menyatakan informasi tidak disediakan secara jelas tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyediakan informasi secara jelas

Responden yang menyatakan informasi disediakan secara akurat dan dapat diperbandingkan adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan informasi tidak disediakan secara akurat dan dapat diperbandingkan tidak ada. Ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyediakan informasi secara akurat.

Responden yang menyatakan informasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya adalah sebanyak 80 orang (83%) sedangkan yang menyatakan informasi tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya adalah 16 orang (17%). Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menyediakan informasi mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan adalah visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,

pemegang saham pengendali, kepemilikan saham atau anggota direksi serta anggota dewan komisaris, sistem dalam pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi perusahaan.

Responden yang menyatakan dengan adanya prinsip keterbukaan tidak akan mengurangi rahasia perusahaan adalah sebanyak 76 orang (80%) sedangkan yang menyatakan dengan adanya prinsip keterbukaan akan mengurangi rahasia perusahaan adalah sebanyak 20 orang (20%). Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya prinsip keterbukaan tidak akan mengurangi rahasia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang

Responden yang menyatakan kebijakan perusahaan telah dinyatakan secara tertulis adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan kebijakan perusahaan tidak dinyatakan secara tertulis adalah tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa kebijakan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah dinyatakan secara tertulis.

Responden yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan tidak dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan tidak ada. Hal ini juga menggambarkan bahwa kebijakan PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Jumlah dari keseluruhan pertanyaan adalah 2016 dan yang menjawab ya/memilih pilihan adalah 1674. Pada prinsip transparansi (*transparency*) ini diketahui bahwa responden yang memahami tentang pelaksanaan prinsip transparansi (*transparency*) adalah sebanyak 83% dan sisanya sebanyak 17% tidak memahami tentang pelaksanaan prinsip transparansi (*transparency*). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah mengetahui dan memahami tentang prinsip transparansi (*transparency*). Hal ini dapat dilihat bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai (memenuhi kebutuhan *stakeholders*), jelas, akurat dan dapat diperbandingkan. Kebijakan perusahaan telah dijelaskan secara tertulis dan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2) Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Tabel IV.4

Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip akuntabilitas?	76	80%	20	20%	96	100%

2	Apakah perusahaan menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?	96	100%	-	-	96	100%
3	Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan perusahaan secara jelas?	96	100%	-	-	96	100%
4	Apakah perusahaan telah memiliki suatu keyakinan?	80	83%	16	17%	96	100%
5	Apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal?	96	100%	-	-	96	100%
6	Apakah perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan?	96	100%	-	-	96	100%
7	Apakah perusahaan telah memiliki sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan?	96	100%	-	-	96	100%
8	Apakah perusahaan telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama?	96	100%	-	-	96	100%
9	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati?	96	100%	-	-	96	100%
10	Apakah perusahaan telah membuat						

	pedoman perilaku (code of conduct?) atas dasar kesepakatan bersama?	96	100%	-	-	96	100%
11	Apakah dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada pedoman perilaku (code of conduct)?	62	65%	34	35%	96	100%
	Total	986		70		1056	

Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner, 2017

Mengenai prinsip akuntabilitas (*accountability*) diperoleh bahwa pemahaman mengenai akuntabilitas (*accountability*) adalah sebanyak 76 orang (80%) yang mengerti tentang prinsip akuntabilitas, Sisanya sebanyak 20 orang (20%) yang tidak mengerti. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dapat memahami dan mengerti mengenai akuntabilitas (*accountability*).

Responden yang menyatakan bahwa Perusahaan telah menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas adalah sebanyak 96 orang (100%), yang tidak menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan

perusahaan secara jelas adalah sebanyak 96 orang (100%), yang tidak menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan perusahaan secara jelas tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan secara jelas.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebanyak 80 orang (83%), yang tidak memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebanyak 16 orang (17%). Hal ini juga menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal adalah sebanyak 96 orang (100%), yang tidak memiliki sistem pengendalian internal tidak ada. Tampak jelas hal ini juga menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah

memiliki system pengendalian internal. Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan tidak ada. Hal ini juga menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan tidak ada. Hal ini dapat menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah memiliki system penghargaan dan sanksi untuk karyawan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang

telah disepakati adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan tidak berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati tidak ada. Hal ini dapat menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam melaksanakan tugasnya telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama adalah sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama .

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada pedoman perilaku (*code of conduct*) sebanyak 62 orang (65%), yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan tidak berpegang pada pedoman perilaku (*code of conduct*) sebanyak 34 orang (35%). Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam melaksanakan tugasnya, telah cukup berpegang pada pedoman perilaku (*code of conduct*).

Jumlah dari keseluruhan pertanyaan adalah 1056 dan yang menjawab ya adalah 986. Pada prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) ini diketahui bahwa responden yang memahami tentang pelaksanaan prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) adalah sebanyak 93% dan sisanya sebanyak 7% tidak memahami tentang pelaksanaan prinsip Akuntabilitas (*Accountability*). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang sangat mengetahui dan memahami tentang prinsip Akuntabilitas (*Accountability*). Hal ini dapat dilihat bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing karyawan secara jelas. Perusahaan juga telah memiliki sistem pengendalian internal, ukuran kinerja untuk semua karyawan, sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan. Perusahaan juga telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama dan karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati. Perusahaan juga telah membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama.

3) Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Tabel IV.5

Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip pertanggungjawaban ?	76	80%	20	20%	96	100%
2	Apakah dalam tugasnya, setiap karyawan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian?	96	100%	-	-	96	100%
3	Apakah perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan?	96	100%	-	-	96	100%
4	Apakah perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar)?	96	100%	-	-	96	100%
5	Apakah perusahaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar)?	96	100%	-	-	96	100%
	Total	460		20		480	

Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner, 2017

Mengenai prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) diperoleh bahwa pemahaman mengenai Pertanggungjawaban

(*Responsibility*) adalah sebanyak 76 orang (80%) yang mengerti tentang prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Sisanya sebanyak 20 orang (20%) yang tidak mengerti. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dapat memahami dan mengerti tentang prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Responden yang menyatakan bahwa dalam tugasnya, setiap karyawan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa dalam tugasnya, setiap karyawan tidak berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian tidak ada. Hal ini dapat menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam menjalankan tugasnya berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan tidak ada. Jelas Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) sebanyak 96 orang (100%),

yang menyatakan bahwa perusahaan tidak membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar).

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) tidak ada. Hal ini dapat menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar).

Jumlah dari keseluruhan pertanyaan adalah 480 dan yang menjawab ya adalah 460. Pada prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) ini diketahui bahwa responden yang memahami tentang pelaksanaan prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) sebanyak 96% dan sisanya sebanyak 4% tidak memahami tentang pelaksanaan prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang sangat mengetahui dan memahami tentang prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Hal ini dapat dilihat bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV

Tanjungrang dalam tugasnya, setiap karyawan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan juga telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) dan telah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) tersebut.

4) Prinsip Kemandirian (*Independent*)

Tabel IV.6

Prinsip Kemandirian (*Independent*)

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip kemandirian?	76	80%	20	20%	96	100%
2	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi pihak lain?	96	100%	-	-	96	100%
3	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu?	96	100%	-	-	96	100%
4	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, karyawan telah bebas dari benturan	96	100%	-	-	96	100%

	kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain?						
5	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan?	96	100%	-	-	96	100%
6	Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan tidak mendominasi atau melempar?	70	73%	26	27%	96	100%
	Total	530		46		576	

Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner, 2017

Mengenai prinsip Kemandirian (*Independent*) diperoleh bahwa pemahaman mengenai Kemandirian (*Independent*) adalah sebanyak 76 orang (80%) yang mengerti tentang prinsip Kemandirian (*Independent*), Sisanya sebanyak 20 orang (20%) yang tidak mengerti. Hal ini dapat menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dapat memahami dan mengerti tentang prinsip Kemandirian (*Independent*).

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi pihak lain sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa

dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan tidak terhindar dari dominasi pihak lain tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam tugasnya telah terhindar dari dominasi pihak lain.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan tidak terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam melaksanakan tugasnya telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, karyawan telah bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, karyawan tidak bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam melaksanakan tugasnya telah bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam melaksanakan tugasnya telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Responden yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan tidak mendominasi atau melempar tanggungjawab antar satu dengan lainnya 70 orang (73%) sedangkan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan mendominasi atau melempar tanggungjawab antar satu dengan lainnya sebanyak 26 orang (27%)

Jumlah dari keseluruhan pertanyaan adalah 576 dan yang menjawab ya adalah 530. Pada prinsip Kemandirian (*Independent*) ini diketahui bahwa responden yang memahami tentang pelaksanaan prinsip Kemandirian (*Independent*) adalah sebanyak 92% dan sisanya sebanyak 8% tidak memahami tentang pelaksanaan prinsip Kemandirian (*Independent*). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah sangat

mengetahui dan memahami tentang prinsip Kemandirian (*Independent*). Hal ini dapat dilihat bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi pihak lain dan pengaruh kepentingan tertentu. Karyawan dalam melaksanakan tugasnya telah terbebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain. Karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

5) Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Tabel IV.7

Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Ya		Tidak		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Apakah anda mengetahui apa itu prinsip kewajaran?	80	83%	16	17%	96	100%
2	Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan?	96	100%	-	-	96	100%
3	Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku	96	100%	-	-	96	100%

	kepentingan untuk memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan?						
4	Apakah perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan?	96	100%	-	-	96	100%
5	Apakah perusahaan telah memberikan perilaku yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan?	96	100%	-	-	96	100%
6	Apakah dalam sistem penerimaan karyawan, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis, kelamin dan kondisi fisik?	96	100%	-	-	96	100%
7	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan kondisi fisik?	96	100%	-	-	96	100%
	Total	656		16		672	

Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner, 2017

Mengenai prinsip Kewajaran (*Fairness*) diperoleh bahwa pemahaman mengenai Kewajaran (*Fairness*) adalah sebanyak 80 orang (83%) yang mengerti tentang prinsip Kewajaran (*Fairness*), Sisanya sebanyak 16 orang (17%) yang tidak mengerti. Hal ini dapat menggambarkan bahwa karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dapat memahami dan mengerti tentang prinsip Kewajaran (*Fairness*).

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan rapat tidak memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan dalam kegiatan rapat tidak memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi

kepentingan perusahaan tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan tidak ada. Hal ini dapat menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan.

Responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan perilaku yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memberikan perilaku yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan tidak ada. Hal ini menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah memberikan perilaku yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Responden yang menyatakan bahwa dalam sistem penerimaan karyawan, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis, kelamin dan kondisi fisik sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa dalam sistem penerimaan karyawan, perusahaan tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis, kelamin dan kondisi fisik tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam sistem penerimaan karyawan, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis, kelamin dan kondisi fisik. Responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan kondisi fisik sebanyak 96 orang (100%), yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan kondisi fisik tidak ada. Hal ini jelas menggambarkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam pelaksanaan tugasnya, telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan kondisi fisik.

Jumlah dari keseluruhan pertanyaan adalah 672 dan yang menjawab ya adalah 656. Pada prinsip Kewajaran (*Fairness*) ini

diketahui bahwa responden yang memahami tentang pelaksanaan prinsip Kewajaran (*Fairness*) adalah sebanyak 97% dan sisanya sebanyak 3% tidak memahami tentang pelaksanaan prinsip Kewajaran (*Fairness*). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah sangat mengetahui dan memahami tentang prinsip Kewajaran (*Fairness*). Hal ini dapat dilihat bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan. Perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan telah memberikan perilaku yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan juga telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan kondisi fisik dalam hal penerimaan karyawan dan pelaksanaan tugasnya.

c. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Data yang diuji validitasnya adalah variabel Prinsip Transparansi (X1), Prinsip Akuntabilitas (X2), Prinsip Pertanggungjawaban (X3), Prinsip Kemandirian (X4), dan Prinsip Kewajaran (X5). Jika hasil uji tersebut dibandingkan dengan nilai R_{tabel} , dengan taraf nyata (α) =

10% dan $n = 96$, maka nilai R_{tabel} yaitu 0.1671 (Lampiran). Menurut Sugiyono (2012:173), jika $R_{hitung} \geq R_{tabel}$, data valid, sedangkan jika $R_{hitung} < R_{tabel}$, data Tidak Valid , maka:

1) Hasil Pengujian Validitas Variabel Prinsip Transparansi (X_1)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach* untuk Indikator variabel Prinsip Transparansi (X_1) dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.8
Hasil Pengujian Validitas
Indikator Prinsip Transparansi (X_1)

No.	Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	R_{tabel} ($\alpha = 10\%$)	Hasil Validitas
1.	$X_{1.1}$	0.643	0.1671	Valid
2.	$X_{1.2}$	0.718	0.1671	Valid
3.	$X_{1.3}$	0.734	0.1671	Valid
4.	$X_{1.4}$	0.648	0.1671	Valid
5.	$X_{1.5}$	0.643	0.1671	Valid
6.	$X_{1.6}$	0.718	0.1671	Valid
7.	$X_{1.7}$	0.734	0.1671	Valid
8.	$X_{1.8}$	0.648	0.1671	Valid
9.	$X_{1.9}$	0.643	0.1671	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel IV.8, menunjukkan bahwa r_{hitung} untuk 9 indikator variabel prinsip transparansi tersebut lebih besar dibandingkan r_{tabel} (0.1671). Hal ini berarti semua indikator pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

2) Hasil Pengujian Validitas Variabel Prinsip Akuntabilitas (X_2)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach* untuk variabel Prinsip Akuntabilitas (X_2) dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.9
Hasil Pengujian Validitas
Indikator Prinsip Akuntabilitas (X_2)

No.	Indikator	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R_{tabel} ($\alpha = 10\%$)	Hasil Validitas
1.	X _{2.1}	0.793	0.1671	Valid
2.	X _{2.2}	0.811	0.1671	Valid
3.	X _{2.3}	0.884	0.1671	Valid
4.	X _{2.4}	0.683	0.1671	Valid
5.	X _{2.5}	0.793	0.1671	Valid
6.	X _{2.6}	0.811	0.1671	Valid
7.	X _{2.7}	0.884	0.1671	Valid
8.	X _{2.8}	0.683	0.1671	Valid
9.	X _{2.9}	0.793	0.1671	Valid
10.	X _{2.10}	0.811	0.1671	Valid
11.	X _{2.11}	0.884	0.1671	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel IV.9, menunjukkan bahwa r_{hitung} untuk 11 indikator variabel prinsip akuntabilitas tersebut lebih besar dibandingkan r_{tabel} (0.1671). Hal ini berarti semua indikator pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

3) Hasil Pengujian Validitas Variabel Prinsip Pertanggungjawaban (X_3)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach* untuk Indikator variabel Pertanggungjawaban (X_3) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.10
Hasil Pengujian Validitas
Indikator Pertanggungjawaban (X_3)

No.	Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	R_{tabel} ($\alpha = 10\%$)	Hasil Validitas
1.	$X_{3.1}$	0.666	0.1671	Valid
2.	$X_{3.2}$	0.589	0.1671	Valid
3.	$X_{3.3}$	0.614	0.1671	Valid
4.	$X_{3.4}$	0.532	0.1671	Valid
5.	$X_{3.5}$	0.666	0.1671	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel IV.10, menunjukkan bahwa r_{hitung} untuk 5 indikator tersebut lebih besar dibandingkan r_{tabel} (0.1671). Hal ini berarti semua indikator pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

4) Hasil Pengujian Validitas Variabel Prinsip Kemandirian (X_4)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach* untuk Indikator variabel Prinsip Kemandirian (X_4) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.11
 Hasil Pengujian Validitas
 Indikator Prinsip Kemandirian (X_4)

No.	Indikator	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R_{tabel} ($\alpha = 10\%$)	Hasil Validitas
1.	X _{4.1}	0.620	0.1671	Valid
2.	X _{4.2}	0.785	0.1671	Valid
3.	X _{4.3}	0.624	0.1671	Valid
4.	X _{4.4}	0.489	0.1671	Valid
5.	X _{4.5}	0.620	0.1671	Valid
6.	X _{4.6}	0.785	0.1671	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel IV.11, menunjukkan bahwa r_{hitung} untuk 6 indikator tersebut lebih besar dibandingkan r_{tabel} (0.1671). Hal ini berarti semua indikator pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

5) Hasil Pengujian Validitas Variabel Prinsip Kewajaran (X_5)

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach* untuk Indikator variabel Prinsip Kewajaran (X_5) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.12
 Hasil Pengujian Validitas
 Indikator Prinsip Kewajaran (X_5)

No.	Indikator	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	R_{tabel} ($\alpha = 10\%$)	Hasil Validitas
1.	X _{5.1}	0.776	0.1671	Valid

2.	X _{5.2}	0.800	0.1671	Valid
3.	X _{5.3}	0.868	0.1671	Valid
4.	X _{5.4}	0.611	0.1671	Valid
5.	X _{5.5}	0.776	0.1671	Valid
6.	X _{5.6}	0.800	0.1671	Valid
7.	X _{5.7}	0.868	0.1671	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel IV.12, menunjukkan bahwa r_{hitung} untuk 7 indikator tersebut lebih besar dibandingkan r_{tabel} (0.1671). Hal ini berarti semua indikator pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Dalam melakukan pengujian reliabilitas terhadap Indikator pernyataan/pertanyaan variabel Prinsip Transparansi (X₁), Prinsip Akuntabilitas (X₂), Prinsip Pertanggung jawaban (X₃), Prinsip Kemandirian (X₄), dan Prinsip Kewajaran (X₅), penulis menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Menurut Umar (2012:198) *Cronbach's Alpha* sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-20, 0-50). Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, Sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik, sehingga:

1) Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Prinsip Transparansi (X_1)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk indikator variabel Prinsip Transparansi (X_1), dapat di lihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel IV.13
Hasil Pengujian Reliabilitas
Indikator Prinsip Transparansi (X_1)

No.	Indikator	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	Hasil Reliabilitas
1.	X _{1.1}	0.894	Reliabel
2.	X _{1.2}	0.887	Reliabel
3.	X _{1.3}	0.885	Reliabel
4.	X _{1.4}	0.892	Reliabel
5.	X _{1.5}	0.894	Reliabel
6.	X _{1.6}	0.887	Reliabel
7.	X _{1.7}	0.885	Reliabel
8.	X _{1.8}	0.892	Reliabel
9.	X _{1.9}	0.894	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.13, hasil perhitungan *Cronbach's Alpha*, semua indikator diperoleh nilai lebih dari 0,800, sehingga indikator tersebut dapat dikatakan reliabel.

2) Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Prinsip Akuntabilitas (X_2)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk indikator variabel Prinsip Akuntabilitas (X_2), seperti pada Tabel IV.7. berikut ini:

Tabel IV.14
Hasil Pengujian Reliabilitas
Indikator Prinsip Akuntabilitas (X_2)

No.	Indikator	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	Hasil Reliabilitas
1.	X _{2.1}	0.953	Reliabel
2.	X _{2.2}	0.951	Reliabel
3.	X _{2.3}	0.948	Reliabel
4.	X _{2.4}	0.955	Reliabel
5.	X _{2.5}	0.953	Reliabel
6.	X _{2.6}	0.951	Reliabel
7.	X _{2.7}	0.948	Reliabel
8.	X _{2.8}	0.955	Reliabel
9.	X _{2.9}	0.953	Reliabel
10.	X _{2.10}	0.951	Reliabel
11.	X _{2.11}	0.948	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan *SPSS ver 16.00*

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.14, hasil perhitungan *Cronbach's Alpha*, semua indikator diperoleh nilai lebih dari 0,800, sehingga indikator tersebut dapat dikatakan reliabel.

3) Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Prinsip Pertanggungjawaban (X_3)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk Indikator variabel Prinsip Pertanggungjawaban (X_3), seperti pada Tabel IV.8. berikut ini

Tabel IV.15
Hasil Pengujian Reliabilitas
Indikator Prinsip Pertanggungjawaban (X_3)

No.	Indikator	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	Hasil Reliabilitas
1.	X _{3.1}	0.758	Reliabel
2.	X _{3.2}	0.767	Reliabel
3.	X _{3.3}	0.766	Reliabel
4.	X _{3.4}	0.788	Reliabel
5.	X _{3.5}	0.758	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan *SPSS ver 16.00*
Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.15, hasil perhitungan *Cronbach's Alpha*, semua indikator diperoleh nilai lebih dari 0,700, , sehingga indikator tersebut dapat dikatakan reliabel.

4) Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Prinsip Kemandirian (X_4)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk Indikator variabel Prinsip Kemandirian (X_4), seperti pada Tabel IV.9. berikut ini

Tabel IV.16
 Hasil Pengujian Reliabilitas
 Indikator Prinsip Kemandirian (X₄)

No.	Indikator	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	Hasil Reliabilitas
1.	X _{4.1}	0.837	Reliabel
2.	X _{4.2}	0.797	Reliabel
3.	X _{4.3}	0.832	Reliabel
4.	X _{4.4}	0.857	Reliabel
5.	X _{4.5}	0.837	Reliabel
6.	X _{4.6}	0.797	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan *SPSS ver 16.00*
 Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.16, hasil perhitungan *Cronbach's Alpha*, semua indikator diperoleh nilai lebih dari 0,700, bahkan ada 4 indikator yang melebihi nilai 0,8 , sehingga indikator tersebut dapat dikatakan reliabel.

5) Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Prinsip Kewajaran (X₅)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk Indikator variabel Prinsip Kewajaran (X₅), seperti pada Tabel IV.17 berikut ini

Tabel IV.17
 Hasil Pengujian Reliabilitas
 Indikator Prinsip Kewajaran (X₅)

No.	Indikator	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	Hasil Reliabilitas
1.	X _{5.1}	0.921	Reliabel
2.	X _{5.2}	0.916	Reliabel
3.	X _{5.3}	0.909	Reliabel

4.	X _{5.4}	0.934	Reliabel
5.	X _{5.5}	0.921	Reliabel
6.	X _{5.6}	0.916	Reliabel
7.	X _{5.7}	0.909	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan *SPSS ver 16.00*
 Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.8., hasil perhitungan *Cronbach's Alpha*, semua indikator diperoleh nilai lebih dari 0,800, , sehingga indikator tersebut dapat dikatakan reliabel.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pada prinsip transparansi (*transparency*), responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip transparansi secara keseluruhan 83% sisanya sebanyak 17% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip transparansi. Yang belum mengerti di dalam prinsip transparansi yaitu informasinya perusahaan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan yang sesuai dengan haknya. Kurang disediakannya informasi tentang strategi perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta sistem dan pelaksanaan *good corporate governance*. Hal yang baik yakni perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai (memenuhi kebutuhan *stakeholders*), jelas, akurat dan dapat diperbandingkan. Kebijakan perusahaan telah dijelaskan secara tertulis dan telah

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Apabila kita kaitkan dengan rumus yang digunakan, prinsip transparansi secara keseluruhan sebanyak 83% hal ini perusahaan sangat mengetahui prinsip transparansi tersebut.

Pada prinsip akuntabilitas (*accountability*), responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mencapai 93% sisanya sebanyak 7% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Yang belum mengerti didalam prinsip akuntabilitas yaitu pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dengan baik karena perusahaan tidak memiliki keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Hal yang baik yakni perusahaan telah menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing karyawan secara jelas. Perusahaan juga telah memiliki sistem pengendalian internal, ukuran kinerja untuk semua karyawan, sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan. Perusahaan juga telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama dan karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati. Perusahaan juga telah membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama. Apabila kita kaitkan dengan rumus yang digunakan, prinsip akuntabilitas secara keseluruhan sebanyak 93%, hal ini perusahaan sangat mengetahui prinsip akuntabilitas tersebut.

Pada prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), responden yang mengetahui pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara keseluruhan

96%, sisanya sebanyak 5% tidak mengerti tentang pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban. Yang belum mengerti didalam prinsip pertanggungjawaban yaitu pelaksanaannya tidak dapat dikerjaakan dengan baik karena sebagian dari karyawan masih belum paham mengenai pengertian dari prinsip pertanggungjawaban. Hal yang baik yakni dalam tugasnya, setiap karyawan berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan juga telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) dan telah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli masyarakat dan lingkungan sekitar) tersebut. Apabila kita kaitkan dengan rumus yang digunakan, prinsip pertanggungjawaban secara keseluruhan sebanyak 96%, hal ini perusahaan sangat mengetahui prinsip pertanggungjawaban tersebut.

Pada prinsip kemandirian (*independency*), responden yang mengetahui pelaksanaan prinsip kemandirian secara keseluruhan 92%, sisanya sebanyak 8% tidak menengerti tentang pelaksanaan prinsip kemandirian. Yang belum mengerti didalam prinsip tersebut yaitu pelaksanaan tidak dapat dikerjakan dengan baik karena sebagian pegawai yang kurang paham terhadap prinsip kemandirian (*independent*), Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagian pegawai mendominasi atau melempar tanggungjawab antara satu dengan lainnya. Hal yang telah baik dilaksanakan adalah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi pihak lain dan pengaruh

kepentingan tertentu. Karyawan dalam melaksanakan tugasnya telah terbebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh/tekanan dari pihak lain. Karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Apabila kita kaitkan dengan rumus yang digunakan, prinsip kemandirian secara keseluruhan sebanyak 92%, hal ini perusahaan sangat mengetahui prinsip kemandirian tersebut.

Pada prinsip kewajaran (*fairness*), responden yang mengetahui tentang pelaksanaan prinsip kewajaran secara keseluruhan sekitar 97%, sisanya sebanyak 3% tidak mengerti tentang prinsip kewajaran. Yang belum mengerti prinsip tersebut yaitu pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dengan baik karena kurangnya pemahaman perusahaan mengenai pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Hal telah baik dilakukan perusahaan adalah dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan bagi kepentingan perusahaan. Perusahaan telah membuka akses atas informasi untuk setiap pemangku kepentingan perusahaan. Perusahaan telah memberikan perilaku yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan juga telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan kondisi fisik dalam hal penerimaan karyawan dan pelaksanaan tugasnya. Apabila kita kaitkan dengan rumus yang digunakan, prinsip

kewajaran secara keseluruhan sebanyak 97%, hal ini perusahaan sangat mengetahui prinsip kewajaran tersebut.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu upaya mewujudkan peningkatan kinerja tersebut dengan konsep *good corporate governance* yaitu transparansi (Transparency), Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (Responsibility), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). *Good corporate governance* juga membantu demi tidak terciptanya manipulasi di sektor keuangannya, seperti laporan laba rugi.

Pada laporan laba rugi telah menunjukkan tingkat transparansi yang baik dikarenakan pada akun-akun pendapatan dan beban lebih dijelaskan secara transparan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengakses laporan laba rugi perusahaan. Pada prinsip kemandirian data-data yang tersaji pada laporan laba rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang disajikan dengan jelas.

Pada prinsip akuntabilitas yang terjadi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah terlihat tingkat pendapatan tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi tingkat laba pada perusahaan. Penyajian laporan laba rugi harus disajikan sesuai dengan keadaan kondisi perusahaan, sehingga karyawan dapat mempertanggungjawabkan laporan laba rugi kepada pemegang saham, data-data yang disajikan telah memenuhi prinsip kewajaran, karena didukung dengan bukti yang kompeten.

Hasil penelitian sejalan dengan manfaat *good corporate governance* dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dimana beban menjadi lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menjadikan pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif dan meningkatkan kemandirian dimana dari subdivisi sudah menjadi divisi yang terpisah dari divisi lain. Menjaga perusahaan untuk tetap taat kepada peraturan, ketentuan dan hukum yang ada di Indonesia.

Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya dari Maulia, Toni dan Cahyani dimana penerapan *good corporate governance* secara baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor.

Diharapkan dalam pelaksanaan kinerja pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar dapat menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemahaman dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *good corporate governance* dalam menilai kinerja perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* itu sendiri, meliputi prinsip transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Karyawan sangat mengetahui prinsip *good corporate governance* yaitu dilihat dari jumlah seluruh kuesioner lebih dari 92%

B. Saran

Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, supaya menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*. Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang juga belum seluruhnya mengetahui mengenai prinsip *good corporate governance*, maka direksi harus memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai prinsip tersebut dengan seminar atau melaksanakan *training*.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani Nuswandari. 2009. Pengaruh *Corporate Governance Perception Index* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2009, Hal. 70 - 84 Vol. 16, No.2 ISSN: 1412-3126
- Despansyah, M. Bani (2015), *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Memperbaiki Kinerja Pada Bank Sumselbabel Jakabaring Palembang, FE-UMP*, Skripsi tidak di publikasikan
- Effendi, Muh Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Maulia. 2014. Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan (studi kasus pada PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.). Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.
- Mulyadi, 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.
- Riduan. 2015. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, Payaman J. 2011, *Manajemen dan Evaluasi kinerja*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI
- Siski Permata (2009), *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapten A.Rivai Palembang, FE-UMP*, Skripsi tidak dipublikasikan.
- Sugiyono . 2016. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedelapan Belas. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER – 01 /MBU/2011 tentang *Good Corporate Governance*

- Toni. 2010. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Internal Audit Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Pendekatan *Balanced Scorecard* (survey PT. Kereta Api Indonesia). Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- UMP. 2012. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Lembaga penerbit fakultas ekonomi UMP.

Responden No

--	--

IDENTITAS RESPONDEN

Pendidikan Terakhir :

Umur :

Lama Bekerja :

Tanda Tangan :

Isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan memberikan *tick mark* atau tanda X sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Prinsip Transparansi atau Keterbukaan (*Transparency*)

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip Transparansi?

Ya Tidak

Jika ya, apa yang dimaksud dengan Transparansi ? (jawaban boleh lebih dari 1)

- Penyediaan informasi yang material.
- Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan informasi perusahaan.
- Kejelasan fungsi dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

2. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

3. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara memadai (memenuhi kebutuhan para *stakeholders*) ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

4. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara jelas ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

5. Apakah perusahaan telah menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

6. Apakah informasi perusahaan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya ?

Ya Tidak

Jika ya, apa saja informasi yang diungkapkan oleh perusahaan ?

Visi

Misi

Sasaran usaha

Strategi perusahaan

Kondisi keuangan

Susunan dan kompensasi pengurus

Pemegang saham pengendali

Kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan direksi

Sistem manajemen resiko

Sistem pengawasan dan pengendalian internal

Sistem dan pelaksanaan *GCG* serta tingkat kepatuhannya

Kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan

Jika tidak, mengapa ?

.....

7. Apakah dengan adanya prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan kerahasiaan perusahaan tidak menjadi berkurang ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

8. Apakah kebijakan perusahaan telah dijelaskan secara tertulis ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

9. Apakah kebijakan perusahaan telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas?

Ya Tidak

Jika ya, menurut anda apa yang dimaksud dengan akuntabilitas (*accountability*) ? (jawaban boleh lebih dari 1)

Pertanggungjawaban dari setiap organ perusahaan.

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ.

Pertanggungjawaban kinerja perusahaan.

2. Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tugas masing-masing karyawan perusahaan secara jelas ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

3. Apakah perusahaan telah menetapkan rincian tanggungjawab masing-masing karyawan perusahaan dengan jelas ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

4. Apakah perusahaan telah memiliki suatu keyakinan bahwa semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peranannya dalam pelaksanaan GCG ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

5. Apakah perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

6. Apakah perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan perusahaan ?

Ya Tidak

Jika ya, dengan cara apa ?

.....

Jika tidak, mengapa ?

.....

7. Apakah perusahaan telah memiliki sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi karyawan ?

Ya Tidak

Jika ya, dengan cara apa ?

Penghargaan (*reward*):

Sanksi (*punishment*) :

Jika tidak, mengapa ?

.....

8. Apakah perusahaan telah membuat etika bisnis atas dasar kesepakatan bersama?

Ya Tidak

9. Jika ya, apakah dalam melaksanakan harganya, setiap karyawan telah berpegang pada etika bisnis yang telah disepakati ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

10. Apakah perusahaan telah membuat pedoman perilaku (*code of conduct*) atas dasar kesepakatan bersama ?

Ya Tidak

11. Jika ya, apakah dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan telah berpegang pada pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip Pertanggungjawaban ?

Ya Tidak

Jika ya, menurut anda apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban ?

(jawaban boleh lebih dari 1)

Pertanggungjawaban atas sistem tata kelola perusahaan.

Pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan berdasarkan perundangan yang berlaku.

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

2. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, setiap karyawan telah berpegang pada prinsip kehati-hatian ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

3. Apakah perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

4. Apakah perusahaan telah membuat perencanaan mengenai tanggungjawab sesuai (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

5. Apakah perusahaan pernah melaksanakan tanggungjawab sosial (peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar) tersebut ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

Prinsip Kemandirian (*independency*)

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip Kemandirian?

Ya Tidak

Jika ya, menurut anda, apa yang dimaksud dengan kemandirian (*independency*) ? (jawaban boleh lebih dari 1)

Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh.

- Pengelolaan secara independen dan tanpa ada pihak lain yang menguasai.
 - Pelaksanaan *GCG* secara mandiri dan konsisten tanpa benturan kepentingan dan pengaruh.
2. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari dominasi oleh pihak lain ?
- Ya Tidak
- Jika tidak, mengapa ?
-
3. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah terhindar dari pengaruh oleh kepentingan tertentu ?
- Ya Tidak
- Jika tidak, mengapa ?
-
4. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah bebas dari benturan kepentingan dan segala tekanan dari pihak lain ?
- Ya Tidak
- Jika tidak, mengapa ?
-
5. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan ?
- Ya Tidak
- Jika tidak, mengapa ?
-
6. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing karyawan tidak mendominasi/melempar tanggungjawab antar satu dengan yang lain?
- Ya Tidak
- Jika tidak, mengapa ?
-

Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip Kewajaran?

- Ya Tidak

Jika ya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) ? (jawaban boleh lebih dari 1)

- Kesetaraan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.
- Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.
- Keadilan dan kewajaran di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.

2. Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan ?

- Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

3. Apakah perusahaan dalam kegiatan rapat telah memberikan kesempatan pemangku kepentingan untuk memberikn masukan bagi kepentingan perusahaan ?

- Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

4. Apakah perusahaan telah membuka akses dari informasi untuk setiap pemangku kepentingan ?

- Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

5. Apakah perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar pada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

6. Apakah dalam sistem penerimaan karyawan, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

7. Apakah dalam pelaksanaan tugasnya, perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik ?

Ya Tidak

Jika tidak, mengapa ?

.....

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN 2014 SD 2016
DIVISI REGIONAL IV TANJUNGPINRANG

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
PENDAPATAN OPERASI			
A. Pendapatan Angkutan KA Penumpang	21.792.303.800	29.097.091.050	26.512.103.720
B. Pendapatan Angkutan KA Barang	1.771.438.919.183	2.163.376.523.549	2.594.069.429.544
C. Pendapatan Pendukung Angkutan KA	141.791.000	74.562.300	12.137.500
D. Pendapatan Usaha Non Angkutan	2.718.171.427	7.527.529.362	3.823.945.662
E. Kompensasi Pemerintah			
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI	1.796.091.185.410	2.200.075.706.261	2.624.417.616.426
BEBAN POKOK PENJUALAN			
A. Beban Operasi Sarana			
1. Beban BBM dan Listrik Aliran Atas	107.057.926.897	190.363.086.738	203.973.221.332
2. Perawatan Sarana Perkeretaapian	37.247.666.887	59.177.219.088	69.098.405.837
3. Beban Pendukung Kantor Unit Sarana	261.622.249	242.868.575	390.021.379
4. Beban Pendukung Operasi	2.584.085.621	3.845.819.156	3.782.162.465
5. Beban Pegawai Operasional dan Komersial	57.314.903.286	59.982.060.142	72.783.664.351
6. Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian	46.959.427.916	119.115.515.923	114.486.490.267
7. Beban Pendukung Angkutan KA			
8. Beban Terminal Peti Kemas	43.640.600	281.046.910	841.083.429
9. Beban Asuransi			
Jumlah Beban Operasi Sarana	251.469.273.456	433.007.616.532	465.355.049.060
B. Beban Operasi Prasarana (Beban Perawatan Prasarana)			
1. Beban Perawatan Prasarana Pendukung Angkutan KA	2.231.425.797	2.973.542.238	2.288.724.854
2. Beban Perawatan dan Operasi Prasarana Perkeretaapian (IMO)	90.366.712.510	223.911.061.489	153.900.348.601
3. Beban Penyusutan AT Prasarana/ Amortisasi Prasarana	308.438.806	389.685.677	532.136.446
4. Beban Stasiun	4.371.440.889	2.725.347.427	2.549.825.614
5. Beban K3	3.483.200.402	5.589.972.529	8.536.362.453
Jumlah Beban Operasi Prasarana (Beban Perawatan Prasarana)	100.761.218.404	235.589.609.360	167.807.397.968
C. Beban Optimalisasi Aset			
1. Beban Perawatan Aset Property PT. KAI	454.129.781	2.391.779.162	1.180.288.013
2. Biaya Pendukung Kantor Unit Komersial - Property	900.138.466	1.913.054.114	1.414.889.354
3. Beban Pegawai Komersial - Property - Optimalisasi	1.588.763.461	5.140.213.021	3.086.631.677
4. Beban Penyusutan AT (Aset Property)	-	40.662.710	1.213.813
Jumlah Beban Optimalisasi Aset	2.943.031.708	9.485.709.007	5.683.022.857
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN	355.173.523.568	678.082.934.899	638.845.469.885
LABA(RUGI) OPERASI	1.440.917.661.842	1.521.992.771.362	1.985.572.146.541
BEBAN USAHA (BIAYA UMUM)			
A. Beban Pegawai Umum	10.123.520.269	9.542.285.010	10.796.112.402
B. Beban Umum dan Administrasi	4.070.499.253	4.187.481.131	7.855.876.951
C. Penyusutan AT Lainnya (Fasilitas Umum)	517.821.401	394.041.771	139.655.068
D. PBB	310.181.626	346.369.070	370.198.593
Jumlah Beban Usaha	15.022.022.549	14.470.176.982	19.161.843.014
LABA(RUGI) USAHA	1.425.895.639.293	1.507.522.594.380	1.966.410.303.527
PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASI			
A. Pendapatan Non Operasi			
1. Bunga/Deposito/Jasa Giro	28.487.772	40.333.821	
2. Pendapatan Non Operasi Lainnya	116.368.877.236	78.948.627.856	4.062.471.195
Jumlah Pendapatan Non Operasi	116.397.365.008	78.988.961.677	4.062.471.195
B. Beban Non Operasi			
LABA(RUGI) NON OPERASI	116.397.365.008	78.988.961.677	4.062.471.195
LABA(RUGI) SEBELUM KERUGIAN LUAR BIASA	1.542.293.004.301	1.586.511.556.057	1.970.472.774.722
LABA(RUGI) LUAR BIASA			
LABA(RUGI) SEBELUM BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	1.542.293.004.301	1.586.511.556.057	1.970.472.774.722
BUNGA			
LABA(RUGI) SETELAH BUNGA	1.542.293.004.301	1.586.511.556.057	1.970.472.774.722
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
A. Pajak Kini			
B. Pajak Tangguhan			
LABA(RUGI) BERSIH	1.542.293.004.301	1.586.511.556.057	1.970.472.774.722

80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
81	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
83	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
85	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
89	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
93	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
94	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
95	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
96	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7
Jumlah	76	96	96	96	96	80	76	96	96	808

82	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
84	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
86	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
89	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
94	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
95	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8
96	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
Jumlah	76	96	96	80	96	96	96	96	96	96	62		986

Prinsip Pertanggungjawaban

No Resp	Pertanyaan					Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	
1	1	1	1	1	1	5
2	1	1	1	1	1	5
3	0	1	1	1	1	4
4	1	1	1	1	1	5
5	1	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	1	5
7	1	1	1	1	1	5
8	1	1	1	1	1	5
9	1	1	1	1	1	5
10	1	1	1	1	1	5
11	1	1	1	1	1	5
12	1	1	1	1	1	5
13	1	1	1	1	1	5
14	1	1	1	1	1	5
15	1	1	1	1	1	5
16	1	1	1	1	1	5
17	1	1	1	1	1	5
18	1	1	1	1	1	5
19	0	1	1	1	1	4
20	1	1	1	1	1	5
21	1	1	1	1	1	5
22	1	1	1	1	1	5

65	1	1	1	1	1	5
66	1	1	1	1	1	5
67	0	1	1	1	1	4
68	0	1	1	1	1	4
69	1	1	1	1	1	5
70	0	1	1	1	1	4
71	1	1	1	1	1	5
72	1	1	1	1	1	5
73	0	1	1	1	1	4
74	1	1	1	1	1	5
75	1	1	1	1	1	5
76	0	1	1	1	1	4
77	1	1	1	1	1	5
78	1	1	1	1	1	5
79	0	1	1	1	1	4
80	1	1	1	1	1	5
81	1	1	1	1	1	5
82	0	1	1	1	1	4
83	1	1	1	1	1	5
84	0	1	1	1	1	4
85	1	1	1	1	1	5
86	0	1	1	1	1	4
87	1	1	1	1	1	5
88	1	1	1	1	1	5
89	0	1	1	1	1	4
90	1	1	1	1	1	5
91	1	1	1	1	1	5
92	1	1	1	1	1	5
93	1	1	1	1	1	5
94	0	1	1	1	1	4
95	0	1	1	1	1	4
96	0	1	1	1	1	4
Jumlah	76	96	96	96	96	460

Prinsip Kemandirian

No Resp	Pertanyaan						Jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
1	1	1	1	1	1	1	6
2	0	1	1	1	1	1	5
3	1	1	1	1	1	0	5
4	0	1	1	1	1	1	5
5	1	1	1	1	1	0	5

73	1	1	1	1	1	1	1	7
74	1	1	1	1	1	1	1	7
75	1	1	1	1	1	1	1	7
76	1	1	1	1	1	1	1	7
77	0	1	1	1	1	1	1	6
78	1	1	1	1	1	1	1	7
79	1	1	1	1	1	1	1	7
80	1	1	1	1	1	1	1	7
81	1	1	1	1	1	1	1	7
82	1	1	1	1	1	1	1	7
83	0	1	1	1	1	1	1	6
84	1	1	1	1	1	1	1	7
85	0	1	1	1	1	1	1	6
86	1	1	1	1	1	1	1	7
87	1	1	1	1	1	1	1	7
88	1	1	1	1	1	1	1	7
89	1	1	1	1	1	1	1	7
90	0	1	1	1	1	1	1	6
91	1	1	1	1	1	1	1	7
92	1	1	1	1	1	1	1	7
93	1	1	1	1	1	1	1	7
94	1	1	1	1	1	1	1	7
95	1	1	1	1	1	1	1	7
96	1	1	1	1	1	1	1	7
Jumlah	80	96	96	96	96	96	96	656

Pilihan	Responden																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Visi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Misi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sasaran usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
Strategi perusahaan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	
Kondisi keuangan	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
Susunan dan kompensasi pengurus	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	
Pemegang saham pengendali	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
Kepemilikan saham direksi dan anggota dewan komisaris	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	
Sistem manajemen resiko	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
Sistem pengawasan dan pengendalian internal	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	
Sistem pelaksanaan <i>good corporate governance</i> serta tingkat kepatuhannya	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kejadian penting yang dapat mempengaruhi perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah	9	9	8	10	11	10	8	12	12	9	11	12	0	11	8	10	8	10	11	11	10	9	10	6	11	11	11	10	10	

67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	Jumah
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	75	
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	62
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	76
1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	64
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	57
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	56
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	76
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	80
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	95
10	9	9	9	11	11	8	9	11	9	10	11	10	10	11	9	9	10	11	8	10	9	10	9	10	8	10	9	9	10	918

LAMPIRAN

Indikator Prinsip Transparansi (X₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.901	.908	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	27.8125	30.407	.643	.894
X1.2	27.3542	26.652	.718	.887
X1.3	27.5521	26.776	.734	.885
X1.4	28.0000	27.916	.648	.892
X1.5	27.8125	30.407	.643	.894
X1.6	27.3542	26.652	.718	.887
X1.7	27.5521	26.776	.734	.885
X1.8	28.0000	27.916	.648	.892
X1.9	27.8125	30.407	.643	.894

Indikator Prinsip Akuntabilitas (X₂)**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.956	.958	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	32.0833	85.130	.793	.953
X2.2	31.7812	80.236	.811	.951
X2.3	31.8646	76.918	.884	.948
X2.4	32.3958	83.000	.683	.955
X2.5	32.0833	85.130	.793	.953
X2.6	31.7812	80.236	.811	.951
X2.7	31.8646	76.918	.884	.948
X2.8	32.3958	83.000	.683	.955
X2.9	32.0833	85.130	.793	.953
X2.10	31.7812	80.236	.811	.951
X2.11	31.8646	76.918	.884	.948

Indikator Prinsip Pertanggung jawaban (X₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.804	.828	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	14.0313	7.673	.666	.758
X3.2	13.6771	6.768	.589	.767
X3.3	13.6563	6.081	.614	.766
X3.4	14.2708	6.831	.532	.788
X3.5	14.0313	7.673	.666	.758

Indikator Prinsip Kemandirian (X₄)

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	96	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.852	.862	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	17.7083	13.177	.620	.837
X4.2	17.2500	10.232	.785	.797
X4.3	17.4479	11.281	.624	.832
X4.4	17.8958	12.284	.489	.857
X4.5	17.7083	13.177	.620	.837
X4.6	17.2500	10.232	.785	.797

Indikator Prinsip Kewajaran (X₅)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	96	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.929	.933	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5.1	19.4167	32.161	.776	.921
X5.2	19.1146	29.113	.800	.916
X5.3	19.1979	27.213	.868	.909
X5.4	19.7292	31.379	.611	.934
X5.5	19.4167	32.161	.776	.921
X5.6	19.1146	29.113	.800	.916
X5.7	19.1979	27.213	.868	.909

TABEL R

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

Website : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

ri / Tanggal : Selasa / 28 Februari 2017
 Waktu : 16.00 WIB
 Nama : Renndy Meidiansyah
 NIM : 222013149.M
 Jurusan : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL IV TANJUNGPINANG

SKRIPSI INI TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DAPAT DIPERKENAKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, SE, SH, M.Si	Pembimbing	11/3 - 2017	
2.	M. Orba Kurniawan, SE, SH, M.Si	Ketua Penguji	11/3 - 2017	
3.	Mizan, SE, M.Si, AK, CA	Ang. Penguji I	11/3 / 2017	
4.	Welly, SE, M.Si	Ang. Penguji II	11 Mar 2017	

Palembang, 15 Maret 2017
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE, AK, M.Si, CA
 NIDN/NBM: 0216106902/944806



KERETA API



Tanjung Karang, 08 Februari 2017

Nomor : 08/II/OP/DV.4/2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Surat Keterangan

1. Menunjuk Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang nomor 49/G-17/FEB-UMP/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Mohon Bantuan Data.
2. Berdasarkan point nomor 1 (satu) di atas, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Renndy Meidiansyah
NIM : 222013149.M
Jurusan : Akuntansi

adalah benar telah menyelesaikan penelitian dan pengambilan data di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n SM OPERASI DIVRE IV TNK
IM PERKA DIVRE IV TNK



Tembusan :
1. Arsip



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN DAN USULAN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RENNDY MEIDIANSYAH	PEMBIMBING
NIM : 22 2013 149 M	KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, SE., SII., M.Si
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DALAM MENILAI KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL IV TANJUNG KARANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1					
2	2/10 - 2016	Up			paru
3					
4					
5	25/10 16	Up			paru
6					
7	2/11 - 16	Up			paru
8					
9	15/11 - 16	Up			paru
10					
11	23/12 16	Up			paru
12					
13	27/12 16	Up			Acce utk Seminar.
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu 6 bulan menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal diampikan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal :
 Universitas Muhammadiyah Palembang
 M. ORBA KURNIAWAN, S.E., M.Si, AK.CA



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami



Tahfidz

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RENDY MEIDIANSYAH
NIM : 222013149.m
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (21) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 2016, 07 نوفمبر, الإثنين
an. Dekan

Wakil Dekan IV

Purmansyah Ariadi
Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

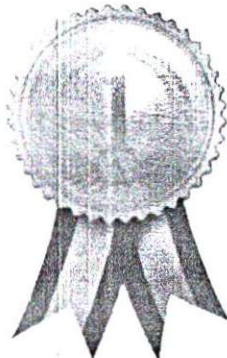


TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Renndy Meidiansyah
 Place/Date of Birth : Palembang, May 31st 1993
 Test Times Taken : +1
 Test Date : January, 31st 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 49
 Structure Grammar : 54
 Reading Comprehension : 47
OVERALL SCORE : 500

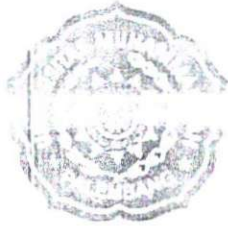


Palembang, February, 04th 2017
 Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

NO. 359/TEA FE/LB/UMP/II/2017

122 Cer 11 10 125



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : RENNDY MEIDIANSYAH
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013149.M
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 31-05-1993

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : KARANG JAYA (B)
Kecamatan : GANDUS
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016



Rektor,

D. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN. 743462/0230106301

BIODATA PENULIS

Nama : Renndy Meidiansyah
Nim : 222013149.M
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Maandi Api No.
41 RT. 69 RW 03 Bukit Lama Ilir Barat I
Palembang
Status : Pelajar/Mahasiswa
Nama Orang Tua
Ayah : Asprianto
Ibu : Ismianah S.Pd.I